



KEMISKINAN DAN LINGKUNGAN HIDUP: MASALAH STRATEGIS DALAM MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI JAWA BARAT

Oleh
Atih Rohaeti Dariah
Universitas Islam Bandung

Abstract - Reducing poverty and improvement of environment quality are the targets of Millenium Development Goals (MDGs). In West Java Province case, it has high rate of poverty. Therefore, it is need policy to overcome this problem in economic perspective. This paper will analyze what's economic sector which generate increasing income of household poverty when it growth, how institutional aspects must follow it and how effect of this economic sector growth on environment quality. Using social accounting matrices and econometric simultaneous equation, show that services sector, beverage and food sector, construction sector, trade sector and agriculture sector can be priority sectors to reduce poverty. It is needed big invesment to create high growth of these economic sectors. Unfortunately, it will be negative effect on environment quality. Expanding in implementation CAC (command and control) policies or creating policies market-based instrument and improving awareness to the environemnt are the solution.

Key Words- poverty, environment quality, social accounting matrices, command and control

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan gerakan MDGs (Millenium Development Goals) yang telah dicanangkan oleh PBB sejak tahun 2000, Pemerintah Propinsi Jawa Barat menggunakan pendekatan target IPM dalam perencanaan makroekonominya. IPM merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia dari aspek pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi (daya beli). Tahun 2004 daya beli riil masyarakat Jawa Barat mencapai 554.570 rupiah dan meningkat tipis menjadi 556.100 rupiah pada tahun 2005 (BPS, 2005). Hal ini terjadi tidak lepas karena inflasi yang tinggi di tahun 2005 sebagai dampak dari kenaikan harga BBM yang cukup signifikan. Sementara laju pertumbuhan penduduk masih bertahan di atas level 2%, implikasinya jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan dari 27,51% pada tahun 2004 menjadi 28,29% dari total penduduk pada tahun 2005.

Tingginya jumlah penduduk miskin adalah gambaran belum berhasilnya pembangunan ekonomi. Professor Dudley Seers mengangkat isu yang mendasar tentang arti pembangunan ekonomi dengan mempertanyakan hal-hal berikut: apa yang terjadi dengan kemiskinan? pengangguran? ketidakerataan? Apabila ketiga hal ini semakin menurun dalam arti kinerjanya semakin baik berarti

pembangunan ekonomi sedang terjadi di wilayah tersebut. Namun sebaliknya jika satu atau dua dari ketiga masalah tersebut ternyata kinerjanya semakin buruk, maka belum dikatakan sudah terjadi pembangunan ekonomi sekalipun pendapatan per kapita naik dua kali lipat (Nafziger, 1997).

1.2 Perumusan Masalah

Penurunan jumlah penduduk miskin dapat dicapai melalui kinerja pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh ketersediaan dana investasi. Namun demikian perlu antisipasi dini dampak negatif dari aktivitas perekonomian terhadap keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu dalam tulisan ini dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Kinerja pertumbuhan ekonomi seperti apakah yang akan berdampak signifikan pada peningkatan pendapatan rumah tangga miskin di Provinsi Jawa Barat ?
2. Bagaimanakah dampak dari pertumbuhan ekonomi tersebut terhadap kualitas lingkungan hidup Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penulisan

Sesuai masalah yang sudah dirumuskan, maka tujuan penulisan ini adalah untuk:

1. Mengidentifikasi sektor-sektor pembentuk pertumbuhan ekonomi yang dilansir memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan

pendapatan rumahtangga miskin di Provinsi Jawa Barat.

2. Mengkaji dampak dari pertumbuhan ekonomi terhadap kualitas lingkungan hidup Jawa Barat.

II TINJAUAN LITERATUR

2.1 Kemiskinan: Definisi dan Pengukuran

Kemiskinan memiliki definisi dari berbagai dimensi, mulai dari aspek pemenuhan kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan, jaminan masa depan, serta kemampuan dalam berperanserta dalam kehidupan bermasyarakat. Implikasi dari luasnya definisi ini menimbulkan kesulitan dalam pengukuran. Yang lebih populer, definisi kemiskinan dibatasi pada aspek pemenuhan kebutuhan pokok atau istilah lain kemiskinan konsumsi (Smeru, 2003). Maka kemiskinan diukur sebagai tingkat konsumsi per kapita di bawah suatu standar tertentu yang disebut sebagai garis kemiskinan.

Indonesia mengadopsi pengukuran garis kemiskinan sebagai biaya yang diperlukan untuk memperoleh sekeranjang makanan dengan kandungan 2.100 kalori per kapita per hari, ditambah dengan biaya untuk memperoleh hal-hal diluar bahan makanan yang dianggap penting. Namun Bank Dunia memiliki perspektif global tentang kemiskinan dengan membedakan kemiskinan absolut, kemiskinan moderat dan kemiskinan relatif. Penduduk yang termasuk miskin absolut adalah yang pendapatannya dibawah \$ AS 1 per hari. Secara detailnya kategori miskin absolut adalah mereka yang mengalami kelaparan, tidak mampu mengakses fasilitas kesehatan, air bersih dan sanitasi, tidak dapat menyekolahkan anak-anaknya, tempat tinggal yang tidak memadai, keterbatasan sandang. Sedangkan yang termasuk kategori miskin moderat yakni yang berpendapatan antara \$ AS 1 sampai \$ AS 2 per hari, dan miskin relatif yakni mereka yang tingkat pendapatan keluarganya di bawah rata-rata pendapatan nasional. Dengan demikian ukuran Bank Dunia yang mendefinisikan kemiskinan absolut ternyata tidak terbatas pada aspek konsumsi, sehingga bisa lebih diandalkan dalam mengkaji peta kemiskinan di tataran global.

2.2 Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Sutomo (1995) kemiskinan penduduk atau rumah tangga dapat ditimbulkan oleh faktor-faktor dari dalam masyarakat sendiri (faktor internal) seperti rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang menyebabkan rendahnya tingkat upah. Tetapi, kemiskinan dapat pula merupakan akibat dari faktor-faktor di luar masyarakat (faktor eksternal) seperti buruknya prasarana dan sarana transportasi sehingga

menyulitkan masyarakat dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkannya, rendahnya aksesibilitas terhadap modal, rendahnya kualitas SDA, penggunaan teknologi yang terbatas, atau sistem kelembagaan yang kurang sesuai dengan kondisi masyarakat, sehingga menyebabkan rendahnya pendapatan yang diterima oleh penduduk atau rumahtangga.

Ditambahkan oleh Schmid (1987) bahwa kemiskinan dapat juga ditimbulkan oleh adanya kegagalan kelembagaan. Menurut Schmid, pendapatan seseorang merupakan biaya bagi orang lain. Seseorang yang memiliki keterampilan atau modal berarti dia mempunyai hak terhadap orang lain sehingga menimbulkan biaya bagi orang lain tersebut. Orang miskin adalah orang yang mempunyai sedikit sekali hak sehingga tidak dapat menimbulkan biaya terhadap orang lain yang mengakibatkan pendapatan orang miskin relatif sedikit. Dalam upaya pengentasan kemiskinan, Schmid menyarankan agar masalah kelembagaan seperti hak kepemilikan bagi penduduk miskin menjadi penting karena dengan hak tersebut mereka dapat memperoleh pendapatan.

Tinjauan kemiskinan secara sosiologis di Indonesia diamati oleh Arief (1990) yang menyatakan bahwa kemiskinan di Indonesia bukan hanya merupakan fenomena kemelaratan materi, tetapi telah merupakan suatu fenomena sosio-kultural yang lebih kompleks. Penduduk miskin merasakan bahwa kemiskinan merupakan suatu atribut permanen untuk mereka sehingga kemiskinan mereka tidak perlu dipersoalkan lagi. Oleh karena itu, satu hal penting dalam masalah pengentasan kemiskinan adalah dengan memahami kondisi masyarakat tersebut dengan memperhatikan SDM yang ada seperti pendidikan, keterampilan, modal dan sebagainya. Melalui meningkatnya kualitas SDM pada kelompok miskin ini, maka mereka diharapkan akan mampu meningkatkan usaha-usaha yang mereka lakukan yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka. Disamping itu, perlu juga untuk menyertakan pendekatan-pendekatan sosio-kultural untuk meningkatkan mentalitas penduduk miskin dalam upaya meningkatkan pendapatan mereka.

2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kerusakan lingkungan terungkap dalam teori EKC yakni *Environmental Kuznet Curve*. Logika hubungan yang terungkap melalui EKC tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut. Ketika tingkat pendapatan per kapita rendah yakni pada saat perekonomian masih bersifat agraris dimana basis ekonomi adalah pertanian subsisten, cenderung tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Selanjutnya ketika perekonomian mulai memasuki tahap industrialisasi, tekanan terhadap lingkungan

mulai meningkat karena penggunaan sumberdaya alam yang lebih banyak, tingkat polusi, penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Akan tetapi ketika pertumbuhan ekonomi berlanjut dan memasuki tahap pasca industrialisasi, penggunaan teknologi ramah lingkungan dan tingkat kesejahteraan menjadi lebih baik, akan meningkatkan kemampuan belanja lingkungan lebih besar (Lindmark 2002 dalam Yandle, et. al 2004).

Sejumlah model empiris EKC menekankan pentingnya peranan elastisitas pendapatan terhadap permintaan kualitas lingkungan sebagai teori pendukung EKC (Beckerman, 1992, Antle dan Heidebrink 1995, Chaduri dan Pfaf 1996 dalam Panayatou 2000). Arrow et al. dalam Panayatou 2000, menyatakan bahwa karena kurva bentuk U terbalik (EKC) maka konsisten dengan dugaan bahwa masyarakat akan belanja secara proporsional lebih banyak untuk kualitas lingkungan ketika pendapatan naik.

Munasinghe dalam Barros (2002) menunjukkan bagaimana kesediaan membayar (WTP = *willingness to pay*) untuk lingkungan dipengaruhi oleh pendapatan dan tingkat pemahaman individu terhadap lingkungan. Model berikut memberikan suatu fakta bagaimana variabel pendapatan dan tingkat pendidikan dapat menjelaskan EKC secara endogenous.

III SEKTOR-SEKTOR EKONOMI YANG BERDAMPAK SIGNIFIKAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN RUMAHTANGGA MISKIN

Untuk menentukan sektor ekonomi yang dilansir berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan rumahtangga miskin, maka digunakan metode analisis SAM (*Social Accounting Matrices*) yang dapat menganalisis interaksi yang bersifat multisektoral termasuk di dalamnya unsur kelembagaan yakni rumah tangga, perusahaan dan pemerintah.

Berdasarkan tabel SAM publikasi BPS Jawa Barat tahun 1999 dan hasil up date tahun 2002 nampak bahwa yang termasuk rumahtangga miskin

adalah rumahtangga buruh tani dan rumahtangga yang berpendapatan rendah baik di desa maupun di kota.

Dengan model analisis SAM maka dapat diketahui sektor yang dinilai berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan tersebut dari besarnya pengganda (*multiplier*) output setiap sektor produktif terhadap berbagai kelas pendapatan rumah tangga.

Berdasarkan besaran koefisien multiplier, lima sektor ekonomi yang dilansir berdampak paling besar terhadap peningkatan pendapatan rumahtangga buruh tani adalah pertanian, industri makanan, minuman dan tembakau; jasa-jasa; bangunan/konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran. Sementara yang berdampak besar terhadap golongan rumahtangga berpendapatan rendah di desa adalah sektor jasa-jasa; industri pengolahan lainnya; bangunan/konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran; dan industri logam dasar dan barang jadi logam. Sedangkan yang berdampak besar terhadap golongan rumahtangga berpendapatan rendah di kota adalah sektor industri pengolahan lainnya; jasa-jasa; industri tekstil, pakaian jadi, kulit dan alas kaki; industri logam dasar dan barang jadi logam; dan industri kimia, bahan kimia, kertas dan plastik. Dengan demikian berdasarkan angka koefisien multiplier semata-mata, ternyata sektor jasa adalah sektor primadona karena dapat mempengaruhi besarnya pendapatan ketiga golongan yang jadi sorotan dalam penelitian ini.

Untuk mempertajam analisis, selanjutnya dilakukan simulasi dari seluruh sektor yang muncul sehingga ditemukan lima sektor yang berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan ketiga kelompok rumahtangga. Melalui tujuh skenario, akhirnya diperoleh bahwa sektor ekonomi yang signifikan mempengaruhi pendapatan rumahtangga miskin adalah sektor pertanian, jasa-jasa, perdagangan, hotel dan restoran, bangunan, dan industri makanan, minuman dan tembakau.

Agar Jawa Barat steril dari penduduk miskin dimana tidak ada lagi penduduk yang memiliki pendapatan per kapita di bawah \$1 per hari, ternyata kelima sektor tersebut harus tumbuh tinggi sehingga kebutuhan investasi pun sangat besar seperti bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Target Pertumbuhan Sektoral dan Kebutuhan Investasi Bagi Peningkatan Pendapatan Rumahtangga Miskin

No	Leading Sektor Pendapatan Rumahtangga Miskin	Target Pertumbuhan Sektoral (%)	Target Investasi (juta Rp)
1	Pertanian	80	33 696.31
2	Ind. Makanan, Minuman & Tbkau	88	1 079 820.97
3	Bangunan/Konstruksi	130	54 205 911.39
4	Perdagangan, Hotel & Restoran	112	944 899.97
5	Jasa-Jasa	96	105 255.12

Sumber : Hasil Perhitungan

Berdasarkan hasil survey, bentuk investasi untuk pengembangan sektor pertanian adalah inovasi aspek kelembagaan yang terkait dengan pasar dan harga, riset pengembangan komoditas yang sesuai dengan kondisi lokal, riset penciptaan nilai tambah komoditas, dan infrastruktur perdesaan. Yang dimaksud dengan inovasi aspek kelembagaan yang terkait dengan pasar dan harga adalah terobosan sistem pemasaran yang bisa meningkatkan posisi tawar petani. Diantaranya mengembangkan lembaga kerjasama diantara petani, meningkatkan kemitraan dengan sektor industri pengolahan, mengembangkan pasar lelang yang mencakup wilayah dan komoditas.

Bentuk investasi untuk pengembangan sektor industri makanan dan minuman adalah riset diversifikasi utilisasi produk-produk pertanian menjadi makanan olahan yang semakin beragam. Apalagi Jawa Barat khususnya Bandung sudah memiliki image sebagai pusat jajanan dan ragam makanan yang enak. Dan seyogianya hasil riset tentang utilisasi produk-produk pertanian menjadi makanan olahan yang semakin beragam dapat diterapkan di perdesaan, selain dekat dengan bahan baku, juga diharapkan akan menjadi stimulan untuk berkembangnya ekonomi perdesaan.

Untuk sektor sektor perdagangan adalah penataan kawasan perdagangan yang tepat dan optimal. Ini adalah bentuk investasi fisik yang diharapkan akan menjadi insentif besar untuk terjadinya peningkatan transaksi jual beli karena baik penjual maupun pembeli merasa lebih nyaman dan aman.

Bentuk investasi untuk pengembangan sektor bangunan adalah diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur yang mendasar untuk disediakan yang secara langsung maupun tidak langsung akan mendorong berkembangnya sektor ekonomi yang dilansir berdampak signifikan pada peningkatan pendapatan masyarakat miskin.

Bentuk investasi untuk pengembangan sektor jasa yang terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan petani lebih baik diprioritaskan pada inovasi kelembagaan diantaranya pembentukan dan penyebaran lembaga penyuluhan di perdesaan melalui sistem yang menarik buat calon penyuluh yang akan terlibat. Sedangkan yang lainnya identik dengan usulan sebelumnya seperti mengembangkan lembaga kerjasama diantara petani dan mengembangkan pasar lelang yang bisa diakses oleh lembaga petani secara langsung.

IV DAMPAK NEGATIF DARI PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Untuk mengamati dampak dari peningkatan output di sektor-sektor ekonomi melalui peningkatan

investasi di sektor-sektor tersebut terhadap kualitas lingkungan Jawa Barat, maka dibangun model makroekonomi lingkungan melalui model analisis ekonometrik persamaan simultan.

Hasil perhitungan menunjukkan ternyata dari lima indikator kualitas lingkungan yakni lahan kritis per kapita, TDS dan BOD per kapita sebagai proxy untuk tingkat pencemaran air, CO dan CO₂ per kapita sebagai proxy untuk tingkat pencemaran udara, hanya luas lahan kritis per kapita yang cenderung turun dari 0,0191 menjadi 0,0172. Sementara TDS per kapita naik menjadi 0,1423 dari 0,1035, dan BOD per kapita dari 0,0224 menjadi 0,0275. Demikian halnya dengan CO per kapita naik dari 0,0456 jadi 0,0485, dan CO₂ per kapita dari 1,0588 menjadi 1,3382. Artinya kondisi lingkungan semakin buruk sehingga akan menjadi *constraint* untuk mencapai pembangunan berkelanjutan ke depannya. Hal ini diperkuat dengan kecenderungan menurunnya PDRB per kapita dari potensinya sebesar 10,448 juta rupiah (harga konstan 2000) menjadi 9,422 juta rupiah.

Hasil simulasi ini memberikan signal bahwa perlu ada terobosan kebijakan untuk mencegah semakin buruknya kualitas lingkungan ketika ekonomi dipacu tumbuh untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Jika tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan ditingkatkan dan implementasi kebijakan pengendalian pencemaran dan udara lebih efektif, hasil estimasi model menunjukkan akan terjadi perbaikan kualitas lingkungan. Hal ini tercermin pada angka-angka indikator pencemaran air dan udara yang semakin rendah.

Hasil survey menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengendalian pencemaran air dan udara juga penanganan lahan kritis belum berjalan sesuai harapan. Dalam penanganan lahan kritis yang dicanangkan melalui gerakan rehabilitasi lahan dan hutan, berdasarkan hasil interview diperoleh informasi bahwa pelaksanaan gerakan rehabilitasi tersebut kurang intensif karena penyediaan bibit dari luar daerah sehingga sampai ke tempat tujuan jadi kering. Kemudian banyak pihak terlibat sehingga kurang terkoordinasi dengan baik. Sementara dalam masalah pengendalian pencemaran air dan udara lebih sulit penanganannya karena sifat air dan udara yang *open access*. Kebijakan selama ini yang cenderung CAC (*command and control*) seperti baku mutu emisi dan limbah cair sulit diikuti karena tidak tegaknya sanksi, pengawasan yang lemah, tingkat patuhan perusahaan yang kurang. Dengan demikian jika kebijakan ini ingin dipertahankan perlu pengembangan kapasitas kelembagaan untuk memperkuat implementasi kebijakan, atau perlu dipikirkan alternatif kebijakan yang cenderung *market-based instrument*, diantaranya melalui pungutan pajak (*green tax*) bagi yang mencemari

lingkungan atau pemberian subsidi bagi mereka yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan.

V PENUTUP

Kemiskinan dan kerusakan lingkungan akan menjadi *constraint* untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat, sehingga perlu menjadi fokus perhatian dan terinternalisasi dalam pembuatan kebijakan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yakni kenaikan PDRB riil menjadi *necessary condition* untuk menurunkan kemiskinan, namun karena diperkirakan pembangunan ekonomi ke depannya (jangka menengah) masih tetap berada pada tahap industrialisasi maka dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan perlu diantisipasi sejak awal.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa terdapat lima sektor ekonomi yang dilansir berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin yakni sektor jasa, sub sektor industri makanan, minuman dan tembakau, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor konstruksi dan sektor pertanian. Pertumbuhan kelima sektor ini memerlukan investasi dalam jumlah besar dan perlu membenahan aspek kelembagaan yang selama ini menjadi penghambat untuk mencapai pertumbuhan yang optimal.

Peningkatan output kelima sektor tersebut melalui peningkatan investasi yang signifikan ternyata cenderung akan memperburuk kualitas lingkungan. Oleh karena itu perlu memperkuat implementasi kebijakan pengendalian kerusakan lingkungan yang berbasis CAC (*command and control*), peningkatan tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan menjajaki kemungkinan diterapkannya kebijakan berbasis instrumen pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Barros, Fabio Granja e ; Augusto F. Mendonça e; Jorge M. Nogueira, 2002, *Poverty and Environmental Degradation: the Kuznets Environmental Curve for the Brazilian Case*, Department of Economics Working Paper 267 University of Brasilia, December 2002
- BPS, Sistem Neraca Sosial EkonoI Jawa Barat, 1999, up dating 2002
- Nafziger E. Wayne., 1997, *The Economics Of Developing Countries*, Prentice Hall
- Panayotou Theodore, 2000, *Economic Growth and the Environment*, CID Working Paper No. 56
- SMERU, Newsletter 03May-Jun-2001-focus on.htm
- Sutomo, Slamet. 1996. Kemiskinan dan Pembangunan Ekonomi Wilayah. Disertasi, Program Pascasarjana, IPB, Bogor

Yandle Bruce, Madhusudan Bhattarai, and Maya Vijayaraghavan, 2004, *Environmental Kuznets Curves: A Review of Findings, Methods, and Policy Implications*

Riwayat Penulis

Atih Rohaeti Dariah
Universitas Islam Bandung